

**IMPLIKASI YURIDIS MENGENAI SAKSI DAN KETERANGAN SAKSI
DALAM PERKARA PIDANA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010**

Tegar Wira Pambudi, Dr.Ismail Navianto, SH,MH

Eny Harjati, SH, MHum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : tegarwpambudi@gmail.com

Abstrak

Pada tahun 2011, MK telah melakukan perluasan terhadap definisi saksi yang terdapat didalam KUHAP. setelah adanya putusan tersebut definisi saksi dan keterangan saksi menjadi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung.

Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Putusan MK, Saksi dan Keterangan Saksi

Abstract

In 2011, the Constitutional Court has made the expansion of the definition contained in the Code of Criminal Procedure witnesses. after the decision of the definition of witnesses and witness testimony be people who do not have to hear, see and direct knowledge and witness testimony be expanded meaning of witness testimony about a

criminal and be heard, seen and experienced myself by saying that knowledge of reasons, including the information in the context of the investigation, prosecution, and trial of an offense of people who are not always heard, seeing and experiencing a criminal event. Description of person who although not see, hear and experience an event can be a witness and can also be valuable as evidence if the witness testimony given information relevant to the ongoing case.

Keywords : Judicial Implications, Constitutional Court, Witness And Witness Tesimony

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu implementasi dari negara hukum di Indonesia saat ini adalah pengaturan dalam sebuah norma-norma hukum publik dan bersifat mengikat kepada seluruh warga negara untuk menciptakan keadilan dan perlindungan terhadap warga negara salah satunya melalui penegakan hukum pidana. Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang diancam pidana (misalnya mengambil barang milik orang lain), pertanggungjawaban dalam hukum pidana (maksudnya siapa yang dapat dijatuhi pidana), serta hukum penitensier yaitu jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana.¹

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia juga telah membawa perubahan penting, tidak hanya dalam praktik peradilan pidana, melainkan juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum acara pidana di Indonesia. Banyak hal-hal baru yang diatur didalam KUHAP terutama dalam ranah pembuktian. Pembuktian dilakukan dilakukan guna mencari fakta-fakta dari sebuah peristiwa dan menentukan nasib seorang terdakwa serta guna mencari dan mendapatkan fakta-fakta terhadap suatu peristiwa tindak pidana.

Saat ini, untuk kepentingan pembuktian, terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah menurut KUHAP guna proses pembuktian acara pidana, yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat-alat bukti yang sah antara lain adalah :²

1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli,
3. surat,
4. petunjuk,

¹ Masruchin Ruba'I, *Hukum Pidana I*, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1989. Hlm 8

² Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

5. keterangan terdakwa.

Berdasarkan kelima alat bukti tersebut dapat dilihat bahwa keterangan saksi berada pada urutan pertama sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Pidana. Hal itu mengartikan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Pada tahun 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui putusan nomor 65/PUU-VIII/2010 membuat suatu pembaharuan dengan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam amar putusannya yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2011 tersebut, MK menyatakan bahwa “Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai orang yang selalu mendengar, melihat, serta mengalami suatu peristiwa.”³

Putusan MK yang meniadakan suatu keadaan hukum atau membentuk hukum baru tersebut tentunya membawa konsekuensi dalam hukum acara pidana di Indonesia yang selama ini baik dalam ketentuan perundang-undangan, literatur maupun doktrin oleh para ahli menjelaskan bahwa saksi haruslah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu tindak pidana tersebut.

Putusan tersebut juga menimbulkan beberapa dampak dalam hukum acara pidana di Indonesia, jika ternyata saksi adalah tidak harus orang yang melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa pidana, lalu bagaimana kriteria orang dapat dijadikan sebagai seorang saksi, kemudian bagaimana

³ Agus Sahbani, *MK Rombak Definisi Saksi dalam KUHAP*, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 10 September 2014

kriteria keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, apakah orang yang tidak melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa pidana dapat menjadi saksi dalam persidangan pidana. Hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena Mahkamah Konstitusi juga tidak memberikan syarat-syarat yang jelas bagaimana kriteria saksi yang dapat memberikan keterangan di persidangan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Berangkat dari hal tersebut maka penulis berencana untuk melakukan penelitian dengan judul “Implikasi Yuridis Mengenai Saksi dan Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010”

B. MASALAH

Bagaimana implikasi yuridis mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana setelah putusan MK nomor 65/PUU-VIII/2010?

C. PEMBAHASAN

Penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis normatif* pada dasarnya merupakan penelitian yang dilakukan karena adanya kekaburan norma, kekosongan norma, atau pertentangan norma. Penelitian secara yuridis normatif yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum sesuai dengan suatu kasus tertentu.⁴ Dalam penelitian ini, jenis penelitian *yuridis normatif* digunakan untuk mengkaji implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 terhadap KUHAP terutama tentang saksi dan keterangan saksi dalam pembuktian perkara pidana, karena putusan tersebut masih mengandung kekaburan norma mengenai bagaimana perluasan saksi dalam pembuktian pada perkara pidana.

⁴ Sumitro, *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung*, 2008, hal 86

Indonesia menganut sistem pembuktian negatif. Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti itu. Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, apabila alat-alat bukti itu ada ditambah dengan keyakinan hakim tersebut. Sistem pembuktian negatif tersebut ditegaskan dalam KUHAP Pasal 183 yang menjelaskan bahwa *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”*.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam rangka pembuktian maka digunakan keyakinan hakim serta alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Maka saat ini berdasarkan Pasal 184 KUHAP memberikan beberapa alat bukti yang sah antara lain :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 KUHAP telah memberikan batasan yang jelas mengenai saksi dan keterangan saksi. Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP telah dijelaskan *“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”* (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHAP). Sedangkan keterangan saksi dalam KUHAP sebelum adanya putusan diatur dalam Pasal 1 angka 27 *“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam suatu peristiwa pidana yang berupa keterangan dari saksi*

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu” (Bab I Pasal 1 angka 27 KUHAP).

Pengaturan tersebut telah memberikan jawaban dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari saksi *de auditu* bukanlah alat bukti yang sah dan tidak memiliki nilai keterangan saksi sebagaimana yang diatur didalam KUHAP. Kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti kesaksian juga ditolak oleh para ahli, S.M Amin yang mengatakan sebagai berikut :⁵

“memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian *de auditu* berarti, bahwa syarat “didengar, dilihat, atau dialami sendiri” tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh juga dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang diluar sumpah. Misalkan A menceritakan sesuatu kepada B, ia melihat C pada suatu malam mencari D dengan pisau terhunus dan muka membayangkan kemarahan. Keesokan harinya kedatangan mayat D terdampar di suatu jalan sepi dengan beberapa tusukan di badan”

Dalam sidang pengadilan, dalam pemeriksaan pembunuhan atas D, maka B didengar sebagai saksi. Ia menceritakan apa yang pernah didengarnya dari A yang tidak didengar oleh karena telah meninggal. Ini berarti, bahwa keterangan-keterangan yang dipergunakan untuk menciptakan bukti adalah keterangan-keterangan saksi B, bukan keterangan A yang seharusnya didengar sebagai saksi.

Pengaturan yang sudah jelas dalam KUHAP mengenai tidak diakuinya kesaksian *de auditu* dan kriteria orang yang dapat memberikan keterangan saksi ternyata masih menimbulkan persoalan karena belum jelasnya pengaturan mengenai saksi secara menyeluruh di dalam KUHAP. Dalam perkembangannya Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP apabila dihubungkan

⁵ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.265

dengan Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP dianggap oleh para ahli bertentangan satu dengan yang lain. Dalam Pasal 65 KUHAP dijelaskan bahwa :

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”

Batasan terhadap keterangan saksi yang ada dalam pasal 1 angka 26 KUHAP akan menyulitkan bagi terdakwa yang hendak mengajukan saksi yang meringankan untuk kepentingan pembelaan terhadap dirinya. Pembatasan terhadap definisi saksi tersebut yang mengakibatkan Yusril Ihza Mahendra yang pada tahun 2010 ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada kasus Sisminbakum di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia kesulitan untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya. Awalnya dalam rangka pembelaan terhadap dakwaan yang diajukan kepadanya, Yusril mengajukan empat orang saksi yang dinilai menguntungkan bagi dirinya. Ke empat orang saksi tersebut adalah Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie, dan Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu dinilai mengetahui fakta seputar proyek sisminbakum di kementerian Hukum dan HAM itu.

Atas dasar penolakan tersebut, Yusril selanjutnya mengajukan gugatan pengujian terhadap pasal 1 angka 26 jo 27 jo Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) yang mengatur mengenai saksi dalam KUHAP kepada Mahkamah Konstitusi. Pertengahan tahun 2011 MK mengeluarkan putusan yang mengadili perkara yang dimohonkan oleh Yusril Ihza Mahendra tentang saksi dalam KUHAP dalam putusan nomor 65/PUU-VIII/2010.

Putusan tersebut termasuk putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif*. Sehingga semenjak dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat tersebut, maka Pasal 1 angka

26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP sepanjang pengertian dari saksi dan keterangan saksi haruslah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat dikatakan tidak berlaku. Analisis yang dilakukan oleh penulis menjelaskan bahwa saksi dalam perkara pidana diperluas maknanya menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang diputuskan setelah adanya gugatan dari Yusril Ihza Mahendra tersebut tentunya membawa dampak dalam pengertian saksi dan keterangan saksi. Sebagaimana dalam amar putusannya, pengertian saksi dan keterangan saksi yang ada didalam Pasal 1 angka 26, Pasal 1 angka 27 KUHAP telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini berarti ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam menentukan kriteria saksi dan keterangan saksi.

Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan yang cukup jelas mengenai sejauh mana nilai keterangan seseorang dapat dijadikan sebagai saksi. Pertimbangan hakim yang diberikan oleh majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut hanya menjelaskan bahwa nilai kesaksian saksi bukanlah terletak apakah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Namun, terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan.

Mengenai relevansi terhadap alat bukti saksi, menurut M. Yahya Harahap mencari relevansi haruslah diujikan cara pemeriksaannya kepada landasan hukum, agar dalam mencari dan mengarahkan keterangan saksi

dalam pemeriksaan, benar-benar tertuju kepada urgensi sesuai dengan yang dikehendaki ketentuan hukum itu sendiri.⁶

Relevansi alat bukti secara sederhana dapat diukur dari apakah alat bukti tersebut sesuai dengan fakta yang dibuktikan.⁷ Relevansi sangat penting dalam hal pembuktian perkara pidana. Pentingnya makna relevansi dijelaskan oleh Eddy O.S Hiraaj dalam pembuktian perkara pidana adalah sebagai berikut :⁸

- a. Bukti harus relevan atau berhubungan.
- b. Bukti harus dapat dipercaya, maksudnya bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat bukti harus didukung oleh bukti lainnya
- c. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya, bukti tersebut haruslah bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.

Arti relevansi sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kecocokan, bersangkutan paut atau berguna secara langsung.⁹ Relevansi jika dikaitkan dengan pembuktian menurut Munir Fuadi merupakan suatu alat bukti dimana penggunaan alat bukti tersebut dalam proses pengadilan lebih besar kemungkinan akan dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas daripada jika alat bukti tersebut tidak digunakan. Dengan demikian, penentuan relevansi sebuah alat bukti dalam hal ini alat bukti

⁶ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.144

⁷ Munir Fuadi, *Op.Cit*, hlm. 28

⁸ Eddy O.S Hiraaj, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm, 13

⁹ Kbbi online

kesaksian bukan diukur dari ada atau tidaknya hubungannya dengan fakta yang akan dibuktikan, melainkan dengan hubungan tersebut dapat membuat fakta yang bersangkutan menjadi lebih jelas.

Penulis menjabarkan dari apa yang dijelaskan dari kalimat diatas dengan sebuah ilustrasi. Misalnya dalam terdapat kehilangan barang akibat adanya tindak pidana pencurian didalam sebuah rumah. Tindak pidana pencurian itu terjadi ketika didalam rumah hanya terdapat 2 orang yaitu A dan B. A kehilangan barang miliknya sedangkan dia mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada orang yang memasuki rumahnya selain B meskipun A tidak melihat sendiri tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh B. Jika A melaporkan tindak pidana yang terjadi terhadapnya, maka keterangan A yang menyatakan bahwa tidak ada orang yang masuk ke dalam rumah selain B menjadi relevan dengan tindak pidana yang sedang berjalan. Hal tersebut menjadi relevan karena keterangan tersebut membuat perkara menjadi lebih terang dibanding jika keterangan tersebut tidak diucapkan.

Relevansi seorang saksi juga dapat didukung oleh alasan “pengetahuannya”.¹⁰ Tegasnya harus mempunyai “sumber pengetahuan” yang logis atau masuk akal. Misalnya, saksi katakana melihat sendiri peristiwa tindak pidana penganiayaan di rumahnya sewaktu ia masih berada di kantor. Hal ini tidaklah dapat dikatakan sebagai kesaksian yang relevan. Jadi, setiap unsur keterangan harus diuji dengan sumber pengetahuan saksi, dan setelah diuji dengan sumber pengetahuan, benar terdapat ketepatan keterangan yang masuk akal, antara keterangan saksi dengan sumber pengetahuannya harus benar-benar konsisten antara yang satu dengan yang lain.¹¹

Selanjutnya, perlu dijabarkan pula apakah putusan ini hanya berlaku bagi perkara pidana umum yang hanya mengacu pada KUHAP, ataukah berlaku bagi semua perkara pidana baik perkara umum maupun perkara

¹⁰ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan*, Op.cit, hlm.145

¹¹ *Ibid.*

khusus. Untuk menjabarkan hal ini maka digunakan asas penyelesaian sengketa hukum. Dalam ilmu hukum dikenal beberapa asas hukum tentang berlakunya undang-undang sebagai berikut:¹²

- 1) UU tidak berlaku surut
- 2) Asas *lex superior derogate legi inferiori*, yaitu undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai derajat yang lebih tinggi. Apabila ada dua UU yang mengatur objek yang sama, maka undang-undang yang derajatnya lebih tinggi didahulukan pemberlakuannya.
- 3) Asas *lex posteriori derogate legi priori*, yaitu undang-undang yang baru mengenyampingkan undang-undang yang lama apabila mengatur objek yang sama
- 4) Asas *lex specialist derogate legi generali*, yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan pemberlakuan undang-undang yang bersifat umum. Artinya apabila ada dua undang-undang yang khusus mengatur tersebut, maka ketentuan yang khusus itulah yang digunakan dalam memutuskan perkara. Misalnya pasal-pasal yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat umum mengatur tentang penyalahgunaan wewenang atau jabatannya (Pasal 423, 424 dan Pasal 425 KUHPidana), maka yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap perkara tindak pidana khusus yang didalamnya memerlukan keterangan saksi didalam pembuktiannya, maka menurut ketentuan asas hukum maka berlaku asas *lex spesiali derogate legi generali* artinya Undang-

¹² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.60

Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan Undang-Undang yang bersifat khusus. Kongkritnya, jika didalam suatu ketentuan Undang-Undang tindak pidana khusus mengatur tersendiri mengenai ketentuan dan kriteria saksi, maka yang berlaku adalah ketentuan saksi dalam Undang-Undang tersebut. Akan tetapi jika Undang-undang mengenai tindak pidana khusus tersebut tidak mengatur mengenai makna dan ketentuan saksi, maka ketentuan dan kriteria saksi kembali lagi mengacu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP sebagaimana telah diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tersebut.

Sebagai contoh dalam kasus Yusril Ihza Mahendra pada tahun 2010 tentang tindak pidana khusus korupsi Sisminbakum di Kementerian Hukum dan HAM. Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur ketentuan mengenai saksi dan keterangan saksi, sehingga pada saat itu ketentuan saksi mengacu kepada makna Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP *jo* Pasal 65 KUHAP karena pada saat itu Yusril bermaksud menghadirkan beberapa orang saksi yang meringankan bagi dirinya. Undang-Undang yang mengatur beberapa tindak pidana khusus lainnya seperti Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE juga tidak memberikan pengertian khusus mengenai ketentuan dan kriteria dari orang yang dapat bernilai sebagai saksi. Sehingga berdasarkan asas hukum yang telah dijelaskan diatas, ketentuan mengenai saksi juga mengacu pada KUHAP.

Sebaliknya, Undang-Undang tindak pidana khusus lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang memiliki ketentuan lain yang mengharuskan saksi melihat dan mendengar sendiri tindak pidana yang terjadi, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi :¹³

Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan.

Sehingga dapat disimpulkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tersebut, ketentuan saksi dan keterangan saksi yang berada didalam KUHAP telah diperluas maknanya menjadi Keterangan dari orang yang tidak harus melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa pidana sepanjang keterangan yang diucapkan relevan dengan peristiwa pidana yang sedang berlangsung dan menjelaskan alasan pengetahuannya itu. Perluasan ini juga berlaku dalam perkara pidana dalam ranah pidana khusus jika Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana khusus tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria saksi dan keterangan saksi, sehingga pengaturannya dikembalikan kepada KUHAP.

Dalam hal kekaburan hukum yang masih terdapat dalam ketentuan tersebut, maka selanjutnya didalam pembentukan R-KUHAP yang tengah berlangsung haruslah diperjelas mengenai kriteria saksi dan keterangan saksi yang dapat bernilai sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana, sehingga menciptakan kepastian hukum yang lebih baik.

¹³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284 *jo* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Implikasi yuridis dari putusan MK nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana adalah bahwa setelah adanya putusan tersebut definisi saksi dan keterangan saksi menjadi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung.

B. Saran

1. Setelah adanya putusan ini penegak hukum diharapkan lebih teliti untuk menghadirkan saksi dalam rangka pembuktian terhadap perkara pidana terlebih setelah diperluasnya definisi saksi dan keterangan saksi dalam KUHAP.
2. Terhadap kriteria saksi yang telah diperluas oleh MK, hendaknya penegak hukum dapat menarik kesimpulan secara tepat untuk menilai relevansi keterangan saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami secara langsung tindak pidana yang terjadi, agar pembuktian dalam perkara pidana dapat berjalan secara tepat.
3. Hendaknya dalam pengaturan di masa mendatang baik dalam Rancangan KUHAP maupun pengaturan yang lainnya lebih menjelaskan batasan-batasan yang tepat mengenai makna relevansi suatu keterangan saksi, agar tidak

menimbulkan kekaburan hukum baik bagi saksi yang memberatkan terdakwa maupun terhadap saksi yang meringankan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Eddy O.S Hiraej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Masruchin Ruba'I, *Hukum Pidana I*, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1989
- M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Sumitro, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 1981/76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284 *jo* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan definisi saksi dalam proses peradilan pidana

Karya Tulis Ilmiah

Fadel, *Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia*, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Universitas Hasanudin, 2012

Martifa Kunto, *Kekuatan Bukti Keterangan Saksi A de Charge Dalam Tindak Pidana Peredaran Obat*, Skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman, 2012

Ahmad Radinal, *Kedudukan Saksi Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia*, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

Internet

Anonim, Saksi *De Audit*, www.hukumonline.com, diakses tanggal 23 November 2014

Anonim, Aturan Saksi Dalam KUHAP Dinilai Saling Bertentangan, www.hukumonline.com diakses pada tanggal 26 November 2014

Jimly Asshidiqie, Sejarah Perkembangan Mahkamah Konstitusi, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 26 September 2014

Makna relevansi, Kbbi online, kbbi.web.id, diakses tanggal 23 Desember 2014